



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TAHUN 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dilakukan reformasi birokrasi;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024, diperlukan rencana kerja reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
4. Peraturan ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Kelompok Kerja:

- a. Manajemen Perubahan;
- b. Deregulasi Kebijakan;
- c. Penataan Organisasi/Kelembagaan;
- d. Penataan Tatalaksana;
- e. Penataan Akuntabilitas;
- f. Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
- g. Penguatan Pengawasan;
- h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
- i. *Quick Wins*.

KETIGA : Ketua Penanggung Jawab Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan pelaksanaan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Anak Tahun 2022 kepada Menteri melalui Sekretaris Kementerian secara periodik atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

- KEEMPAT : Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

RENCANA KERJA REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TAHUN 2022

A. Rencana Kerja Kelompok Kerja Manajemen Perubahan

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih dianggap proyek	1. Internalisasi Reformasi Birokrasi ke seluruh pegawai secara tatap muka/dalam jaringan (<i>online</i>)	Seluruh pegawai Kemen PPPA berkontribusi aktif dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, serta memiliki pelayanan	1. Indeks Reformasi Birokrasi 2. Capaian nilai area manajemen perubahan												
		2. Penanaman nilai PEDULI pada seluruh pegawai	Seluruh pegawai melakukan														



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 5 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022													
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
		3. Survei keterlibatan pegawai dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja	transformasi budaya kerja	publik yang prima di Kemen PPPA	3. Indeks Kepemimpinan Perubahan														
2.	Penyesuaian perubahan peraturan tentang Reformasi Birokrasi	1. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi (Keputusan Menteri)	Keputusan Menteri PPPA tentang Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	2. Terwujudnya organisasi yang berubah ke arah yang lebih baik															
		2. Penyusunan Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)																
		3. Internalisasi peraturan tentang Reformasi Birokrasi ke Unit Kerja Eselon (UKE) I secara tatap muka/dalam jaringan/media online	Pegawai yang paham Reformasi Birokrasi																
3.	Belum optimalnya peran pegawai dan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) dalam upaya menggerakkan organisasi ke arah perubahan yang lebih baik	1. Peningkatan kapasitas Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan	Sertifikat Pemimpin Perubahan dan Agen Perubahan																
		2. Penyusunan rencana aksi Agen Perubahan	Rencana aksi Agen Perubahan																
		3. <i>Monitoring</i> dan Pelaporan pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan	Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi Agen Perubahan																
		4. Internalisasi peraturan tentang Reformasi	Pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang																



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		Birokrasi ke pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) secara tatap muka/dalam jaringan	memahami paham Reformasi Birokrasi														
4.	Belum optimalnya <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemen PPPA	1. Peningkatan kapasitas asesor	Sertifikat asesor	Nilai Penilaian Mandiri	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi												
		2. <i>Monitoring</i> dan evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi Reformasi Birokrasi secara berkala														
		3. Rapat koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Kementerian dan UKE I	Terselenggaranya rapat koordinasi Tim Reformasi Birokrasi Kementerian dan UKE I														
5.	Belum efektifnya media Reformasi Birokrasi Kemen PPPA	<i>Update</i> konten dalam situs Reformasi Birokrasi dan media sosial secara berkala	Pegawai Kemen PPPA mengetahui perkembangan Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan tentang Reformasi Birokrasi bagi pegawai Kemen PPPA	Indeks <i>e-Government</i> Nasional/ Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)												



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

B. Rencana Kerja Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Belum ada evaluasi sistem pengendalian peraturan perundang-undangan dan apakah masih relevan untuk beberapa tahun ke depan	Evaluasi dan perbaikan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan dengan melakukan perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Perubahan atas Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum di Lingkungan Kemen PPPA	Penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan sistem pengendalian peraturan perundang-undangan	1. Capaian area deregulasi kebijakan yang meningkat 2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan												
2.	Belum optimalnya capaian Program Legislasi Kemen PPPA	Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi Program Legislasi Kemen PPPA	1. Tersusunnya Keputusan Menteri PPPA tentang Program Legislasi Kemen PPPA 2. Laporan evaluasi pelaksanaan Program Legislasi Kemen PPPA	Meningkatnya capaian Program Legislasi Kemen PPPA													
3.	Belum optimalnya mekanisme evaluasi kebijakan untuk lebih memastikan efektivitas suatu kebijakan serta relevansinya dengan permasalahan yang dihadapi	1. Reviu pedoman evaluasi efektivitas kebijakan 2. Internalisasi <i>tools</i> evaluasi efektivitas kebijakan 3. Pelaksanaan evaluasi efektivitas kebijakan	1. Pegawai di unit kerja masing-masing yang memahami evaluasi efektivitas 2. Laporan hasil evaluasi dan hasil reviu	Kebijakan yang terukur efektivitasnya													



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

C. Rencana Kerja Kelompok Kerja Penataan Organisasi/Kelembagaan

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Belum dilaksanakan tindak lanjut hasil evaluasi kelembagaan	Pelaksanaan rekomendasi hasil evaluasi kelembagaan	Rancangan rekomendasi hasil evaluasi kelembagaan	Organisasi yang tepat fungsi, tepat struktur, dan tepat ukuran	1. Capaian area penataan organisasi/ kelembagaan meningkat												
2.	Pengelolaan jabatan pasca penyederhanaan birokrasi belum dapat berfungsi secara optimal	Penajaman Analisa Jabatan berdasarkan kinerja organisasi	Analisa Jabatan	Jabatan Fungsional yang mendukung tujuan organisasi	2. Indeks Kelembagaan												
3.	Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) belum memadai untuk menyediakan layanan perlindungan dan terhambat karena agenda penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah	Pendampingan Pembentukan UPTD PPA	UPTD PPA Provinsi/ Kabupaten/Kota	UPTD PPA menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak													
4.	belum dilaksanakan evaluasi kelembagaan UPTD PPA untuk mendukung pelayanan PPPA	Evaluasi kelembagaan UPTD PPA	Hasil evaluasi UPTD PPA	UPTD PPA menyediakan pelayanan perlindungan perempuan dan anak													



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

D. Rencana Kerja Kelompok Kerja Penataan Tatalaksana Tahun 2022

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Pelaksanaan tugas di proses utama belum terstandar	Penyusunan Peta Lintas Fungsi untuk Proses Utama	Penetapan Proses Bisnis dengan Peta Lintas Fungsi	Tata laksana instansi yang tepat proses	1. Capaian area penataan tata laksana												
2.	Belum dilakukan evaluasi terhadap prosedur operasional tetap (SOP)	1. Evaluasi SOP secara berkala (minimal 1 kali dalam 1 tahun) 2. Penyusunan SOP Layanan Publik	SOP yang ditetapkan dan di implementasikan	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas SOP	2. Capaian area penataan tata laksana												
3.	Belum efektif atau maksimalnya Tim Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1. Melakukan kegiatan dan penyusunan dokumentasi untuk peningkatan nilai kematangan per indikator SPBE (seperti: pembentukan Keputusan Menteri tentang Tim Koordinasi SPBE, Pembaharuan Arsitektur SPBE,	1. Dokumen Keputusan Menteri PPPA tentang Tim Koordinasi SPBE, Pembaharuan Arsitektur SPBE, Pembaharuan Rencana Induk, Dokumen Perencanaan Manajemen Resiko,	Kepuasan Layanan SPBE yang optimal	Tercapainya seluruh nilai indikator evaluasi mandiri minimal 3												



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
		Rencana Induk, Pengembangan Aplikasi Publik dan lainnya) 2. Melakukan kegiatan evaluasi mandiri	aplikasi sesuai standar dan terintegrasi dan <i>output</i> lainnya) 2. Nilai Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Evaluasi Mandiri SPBE 2022 dan data dukung terbaru														
4.	Belum tersusunnya Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2022	Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2022	Penetapan Keputusan Menteri PPPA tentang DIP dan DIK Tahun 2022	Informasi publik yang tersedia dengan baik	Tercapainya penilaian dengan kategori nilai 90 (Informatif)												



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

E. Rencana Kerja Kelompok Kerja Penataan Akuntabilitas

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Belum optimalnya perencanaan dengan pelaksanaan kinerja	1. Penyusunan Perjanjian Kinerja yang <i>cascade</i> dari jabatan di atasnya	Perjanjian Kinerja yang <i>cascade</i> dari jabatan di atasnya	Pencapaian kinerja organisasi	1. Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) 2. Capaian area akuntabilitas yang meningkat 3. Indeks Perencanaan												
		2. Pelaksanaan Forum Perjanjian Kinerja															
		3. Penyusunan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (PK)	Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (PK)														
		4. <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Perjanjian Kinerja (PK) secara Berkala	Hasil <i>Monitoring</i> Perjanjian Kinerja (PK)														
2.	Perlu penyesuaian formula pengukuran seluruh indikator yang ada agar dapat diuji relevansi antara angka indikator yang dihasilkan dengan sasaran kinerja yang ingin diwujudkan	Penyusunan revisi meta data indikator kinerja	Tersusunnya revisi metadata indikator kinerja (Keputusan Menteri PPPA)														
3.	Belum optimalnya kapabilitas sumber daya manusia (SDM) Pengelola Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kapasitas SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya kapasitas SDM Pengelola Akuntabilitas Kinerja														



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
4.	Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi teknologi informasi kinerja dan anggaran yang sudah dibangun (SIMEKAR) yang dapat mengintegrasikan informasi perencanaan, penganggaran, dan kinerja, juga sebagai media dalam melakukan reuiu capaian kinerja secara berkala	Peningkatan kapasitas SDM Pelaporan Kinerja dan Anggaran pada aplikasi SIMEKAR	Meningkatnya kapasitas SDM Pelaporan Kinerja dan Anggaran pada aplikasi SIMEKAR														
		<i>Monitoring</i> dan evaluasi pemanfaatan aplikasi SIMEKAR secara berkala	Hasil <i>Monitoring</i> dan evaluasi pemanfaatan aplikasi SIMEKAR														



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

F. Rencana Kerja Kelompok Kerja Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Lambatnya pelaksanaan <i>merit system</i> di Kemen PPPA	1. Perencanaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sesuai dengan fungsi organisasi (analisis jabatan, analisis beban kerja, dan audit kepegawaian) 2. Pelaksanaan promosi sesuai dengan <i>Talent Pool</i> 3. Pendidikan dan pelatihan 4. Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan penilaian kinerja 5. Penyusunan pola karir 6. Promosi terbuka 7. Penerapan <i>reward system</i> 8. Penerapan kode etik	1. Analisis jabatan, analisis beban kerja, dan laporan hasil audit kepegawaian 2. Laporan <i>Talent Pool</i> 3. Sertifikat pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 4. Rekapitulasi pembayaran tunjangan kinerja 5. Laporan penyusunan pola karir 6. Laporan pelaksanaan promosi terbuka 7. Rekapitulasi pegawai yang menerima <i>reward system</i> 8. Laporan penerapan kode etik	Terlaksananya pelaksanaan <i>merit system</i> yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara	1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Capaian area penataan sistem manajemen sumber daya manusia yang meningkat 3. Indeks <i>Merit System</i> 4. Indeks Tata Kelola Manajemen Sumber Daya Manusia												



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
2.	Belum dilakukannya <i>monitoring</i> dan evaluasi berkala atas pengembangan kompetensi pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi	Penyusunan evaluasi berkala pengembangan kompetensi pegawai	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi berkala pengembangan kompetensi pegawai	Pengembangan kompetensi pegawai													



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

G. Rencana Kerja Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Belum maksimalnya implementasi kebijakan pengawasan	1. Internalisasi kebijakan pengawasan secara tatap muka/dalam jaringan (Sosialisasi Program Kerja Pengawasan Tahunan, Piagam Audit Internal) 2. menyusun panduan teknis pengawasan antara lain (Audit Kinerja, Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga, panduan teknis evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1. Pegawai yang memahami kebijakan pengawasan 2. Panduan teknis pengawasan	Unit kerja yang bersih (bebas dari temuan material)	1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas laporan keuangan 2. Capaian area penguatan pengawasan yang meningkat 3. Kapabilitas APIP level 3 4. Maturitas SPIP level 3												
2.	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) belum sampai level 3	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian APIP	1. Pemetaan <i>Internal Audit Capability Model</i> (IACM) 2. APIP yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan terkait IACM	Pengawasan yang berkualitas													



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
			3. Terlaksananya audit kinerja														
3.	Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) level 3	Melaksanakan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian Maturitas SPIP yaitu menyusun rencana aksi atas <i>area of improvement</i> SPIP	Rencana aksi atas <i>area of improvement</i> SPIP yang dilaksanakan														
4.	<i>Monitoring</i> pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan pelaporan LHKPN Melakukan verifikasi kewajaran pelaporan LHKASN Penyusunan laporan pemantauan LHKASN akhir tahun pada pimpinan instansi dengan tembusan ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) 	<ol style="list-style-type: none"> Laporan hasil pemantauan LHKPN Laporan verifikasi kewajaran pelaporan LHKASN Laporan pemantauan LHKASN akhir tahun pada pimpinan instansi dengan tembusan ke Menteri PANRB 														



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
5.	Belum dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi berkala terkait sistem pelaporan <i>Whistleblowing System</i> (WBS)	<ol style="list-style-type: none">Melakukan internalisasi kebijakan tentang WBSMelakukan evaluasi efektivitas sistem pelaporan serta komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) WBS secara berkala (survei)Melaksanakan tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi	<ol style="list-style-type: none">Pegawai yang memahami sistem pelaporan WBSLaporan evaluasi efektivitas sistem pelaporan dan KIE WBS secara berkala (hasil survei)Tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi														
6.	Belum ada mekanisme pengumpulan data pengaduan masyarakat terkait Kemen PPPA (data pengaduan, selain dari instansi juga melalui media lain dan instansi, serta data penanganan pengaduan)	<ol style="list-style-type: none">Penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengumpulan data pengaduan masyarakatPenyusunan laporan dan matriks atas pengumpulan data pengaduan masyarakatMelaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat	<ol style="list-style-type: none">SOP pengumpulan data pengaduan masyarakatLaporan dan matriks atas pengumpulan data pengaduan masyarakatLaporan <i>monitoring</i> dan evaluasi tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat														



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
7.	Belum ada unit kerja yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)	<ol style="list-style-type: none">Melakukan penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di satuan kerjaPengusulan unit kerja WBK dan WBBM ke Menteri PPPA kemudian disampaikan ke Menteri PANRB	<ol style="list-style-type: none">Laporan hasil penilaian pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBMSurat usulan unit kerja WBK dan WBBM ke Menteri PPPA dan ke Menteri PANRB	Terbentuknya unit kerja yang sesuai dengan persyaratan Zona Integritas untuk diajukan sebagai WBK dan WBBM													



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIC INDONESIA

- 19 -

H. Rencana Kerja Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	Belum disusun Standar Pelayanan Publik dan standar operasional prosedur (SOP) yang terkait (termasuk pengaduan pelayanan publik)	1. Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan SOP yang terkait 2. Internalisasi Standar Pelayanan Publik dan SOP yang terkait	1. Standar Pelayanan Publik dan SOP yang terkait 2. Pegawai yang memahami Standar Pelayanan Publik dan SOP yang terkait	Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Indeks Pelayanan Publik 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat 3. Capaian area pelayanan publik yang meningkat 4. Tingkat kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik												
2.	Belum tersedianya <i>reward</i> dan <i>punishment</i>	Penetapan <i>reward</i> dan <i>punishment</i> pelaksanaan pelayanan publik	Rekapitulasi penerima <i>reward</i> dan <i>punishment</i> (Keputusan Menteri PPPA)														
3.	Belum tersedianya kemudahan pelayanan dan media informasi	1. Penyusunan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) informasi layanan 2. Penyebarluasan KIE informasi layanan	1. KIE informasi layanan 2. KIE informasi layanan yang disebarluaskan di media informasi														
4.	Belum dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas pelaksanaan pelayanan terutama pelayanan langsung dan koordinasi	1. Penyusunan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 2. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	1. Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi pelaksanaan pelayanan 2. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat														



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

- 20 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	(termasuk pengaduan pelayanan publik)	3. Pemantauan tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dan SKM	3. Laporan pemantauan tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi dan SKM														
5.	Belum disusun standar pelayanan dan rencana aksi pengelolaan pengaduan publik	1. Penyusunan Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Publik 2. Penyusunan Rencana Aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (SP4N LAPOR!) 3. Melakukan internalisasi terkait Standar Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, standar operasional prosedur, dan tugas fungsi pejabat penghubung	1. Standar Pelayanan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 2. Rencana Aksi 2020-2024 Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan <i>Online</i> Rakyat (SP4N LAPOR!) 3. Pejabat penghubung memahami standar pelayanan dan mampu melakukan tugas sesuai dengan SOP														
6.	Belum optimalnya pemberian pelayanan publik melalui	Integrasi aplikasi pelayanan publik dalam sistem teknologi informasi Kemen PPPA	Aplikasi pelayanan publik yang terintegrasi dalam sistem teknologi informasi Kemen PPPA														



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	OUTCOME	INDIKATOR	TAHUN 2022											
						JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
	pengembangan teknologi informasi																



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

I. Rencana Kerja Kelompok Kerja *Quick Wins*

NO	PERMASALAHAN	RENCANA AKSI	OUTPUT	TAHUN 2022													
				JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
1.	Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan Program <i>Quick Wins</i>	Pendampingan pelaksanaan Program <i>Quick Wins</i>	Program <i>Quick Wins</i> selesai tepat waktu														
		Menyusun instrumen pemantauan dan evaluasi	Hasil pemantauan dan evaluasi Program <i>Quick Wins</i>														
		Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program <i>Quick Wins</i>															

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI ✓